

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014: 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus di lakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang di lakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam membangun secara luas.

Menurut H. Hugh Heglo (Abidin, 2012: 6) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Anderson dalam (Tahir, 2015: 21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu : pandangan yang kedua, ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (Policy Implementation). Mereka melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mempunyai dampak dan akibat-akibat yang diramalkan (predictable), atau dapat diantisipasi sebelumnya. Seperti apa yang di kemukakan oleh Nugroho (Tahir, 2015: 26) mengemukakan kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan di beri sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi di jatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjahtukan sanksi.

Namun pada hakikatnya, bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya di lakukan dari pada apa yang di usulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini di lakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang di usulkan menjadi kurang memadai.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Bullock et al (Anggara, 2014: 45) utuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu di ikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan. Oeleh karena itu, kebijakan sebagai suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini:

- a) Ketetapan, suatu kebijakan di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang memiliki pangsruh mengikat, baik ke dalam maupun keluar dari pembuat kebijakan.
- b) Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu.
- c) Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
- d) Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah di tetapkan.

Memecahkan sebuah permasalahan yang di hadapi kebijakan publik William Dunn (Anggara, 2014: 120) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus di lakukan, yaitu:

1. Penyusunan agenda

Agenda Setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruan untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang di pertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam

agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah –masalah tersebut di definisikan untuk di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pihak kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi

Bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan tahap akhir, tetapi juga di lakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang di usulkan, menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu di buat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak di laksanakan. Bahkan menurut Huntington (mulyadi, 2016: 24) perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang di buat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden negara itu.

Menurut Gordon Pasolong (Mulyadi, 2016: 24) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisasikan berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan feasibl. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang

yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang di hadapi.

Tachjan (Tahir, 2015 : 53) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik, di samping dapat di pahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat di pahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

2.1.3 Pendekatan Rasional Top-down dalam Implementasi Kebijakan

1) Pendekatan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky

Karya Pressman dan Wildavsky ialah model implementasi yang pertama kali dimunculkan. Judulnya adalah *implementation* yang mengatakan bahwa implementasi dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Pendekatan *Game Theory* mungkin lebih biasa dimanfaatkan daripada teori probabilitas untuk menganalisis Implementasi. Dengan kata lain, pendekatan kolaborasi antaraktor yang terlibat biasa direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan hubungan dalam mata rantai implementasi Bowen (Anggara, 2014:238-239).

2) Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoretis Proses Implementasi Kebijakan

Dari pernyataan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:240-243) bahwa ada enam variable (kelompok variable) yang harus perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas adalah perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Sumber daya dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.
- c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering kali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
- e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut, apakah elite mendukung implementasi).

- f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

3) Pendekatan Eugene Bardach: The Implementation Game

Eugene Bardach (Anggara, 2014:244-245) hasil analisisnya dari berbagai kasus yang dia teliti tentang implementasi kebijakan dalam bukunya. Yang menyatakan bahwa proses politik dalam suatu *policy* tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tetapi juga sampai pada tahap pelaksanaannya kebijakan tersebut dilaksanakan.

4) Pendekatan Christopher Hood

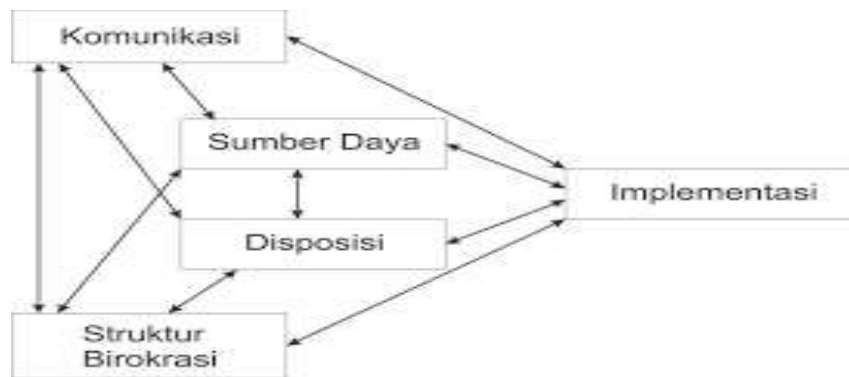
Hood dalam bukunya *Limit to administration* menyarankan lima syarat (yang merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi biasa berlangsung sempurna, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi yang ideal yaitu produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas.
- b. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas
- c. Orang-orangnya dapat dipastikan akan melaksanakan hal-hal yang diminta
- d. Harus ada komunikasi yang sempurna dari dalam antar organisasi.
- e. Tidak ada tekanan waktu.

5) Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi

Dari Keempat Variabel ini, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan

saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.



(Sumber : Anggara, 2014 : 250)

Gambar 2.1 Model hubungan Antar variabel Implementasi Kebijakan Edward III

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

b. Sumberdaya

Sumber daya yang diperlukan Implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

- 1) Staf, yang jumlah kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kewenangan yaitu yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
- 4) Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
- 3) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

6) Pendekatan Merilee S. Grindle: content of policy and context of implementation

a. Isi kebijakan (*Content of policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3) Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Kredibilitas pesan kebijakan tidak terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sanksi tidak dilakukan dengan konsisten.

4) Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5) Pelaksana program

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

6) Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

b. Konteks implementasi (*Context of implementation*)

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks

implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikannya.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaiannya konflik mengenai “siapa yang mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Wimmy Haliim, yang berjudul “Poverty Reduction for Extremely Poor Households of Malang City by the Implementation of Program Keluarga Harapan” yang dimuat pada Jurnal Bina Raja, 2016, 8 (2) : 331-340 ISSN 2503-3360. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah: informan kunci (impelentasi program, kemiskinan, keluarga harapan). Abstrak Penelitian ini didasarkan pada rendahnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan di Kota Malang yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan masalah kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH telah dilaksanakan dengan baik dan

sesuai prosedur dan jumlah penerima RTSM PKH dari tahun ke tahun mengalami penurunan (Wimmy Haliim, 2016).

- 2) Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat (Studi kasus di kelurahan Kauman Kota Malang). Jurnal ilmu Administrasi Negara Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan (Placeholder1)fenomena-fenomena yang ada baik fenomena buatan manusia maupun alamiah, fenomena itu biasa berupa bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata, 2006:72). Peneliti lakukan sosialisasi dilakukan oleh sekolah yang mana siswa kurang mampu yang mendapatkan melalui rapat sosialisasi program kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui KIP dengan kesetaraan usia 6-21 tahun, sedangkan untuk prosedur verifikasi data dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengajukan nomor KPS dan KIP untuk mendapatkan dana. Dengan mengajukan ke perangkat desa untuk KPS dan KIP langsung ke sekolah bersangkutan. Dalam pembagian kartu dilakukan apa bila syarat yang telah ditetapkan sudah memenuhi dan sudah terseleksi kartu KIP dan KPS tersebut dibagikan secara berkelanjutan. Dalam pencairan dana bagi yang punya kartu KIP dan KPS membuat rekening yang kemudian diberitahukan bahwa dana

bisa diambil. Tujuan penelitiannya adalah Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada masyarakat Kelurahan Kauman serta mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat Kelurahan Kauman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan pengelompokan masyarakat ini dilakukan oleh petugas untuk memudahkan dalam pembagian bantuan yang dimaksud kartu penjamin sosial dan kartu indonesia pintar di wilayah Kota Malang khususnya di Kelurahan Kuaman yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 560 jiwa warga miskin diantaranya yang berhak mendapatkan kartu penjamin sosial hanya 30% sedangkan kartu indonesia pintar sebanyak 5%. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin (Sulhan & Sasongko, 2017).

- 3) Priska A. Matualage (2017) Dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting). Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuminting mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil sebagai berikut: a). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi KSM namun belum terjangkau sepenuhnya. b). Salah satu faktor terpenting dari program PKH ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Matualage, 2017).

- 4) Clara Dheby, Abdul Kadir Adys, Muhammad Idris (2017) dengan Judul Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan Jurnal Administras Negara Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetil mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hasil penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang

kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan dengan mengacu pada variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan terlaksana dengan baik. PKH bidang kesehatan telah mampu mengubah perilaku dan pola hidup sehat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tamalate. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan dengan mengacu pada dua variabel yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan belum terimplementasikan dengan baik. Program-program yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak KPM Kecamatan Tamalate tidak dilaksanakan secara maksimal (Clara, 2017).

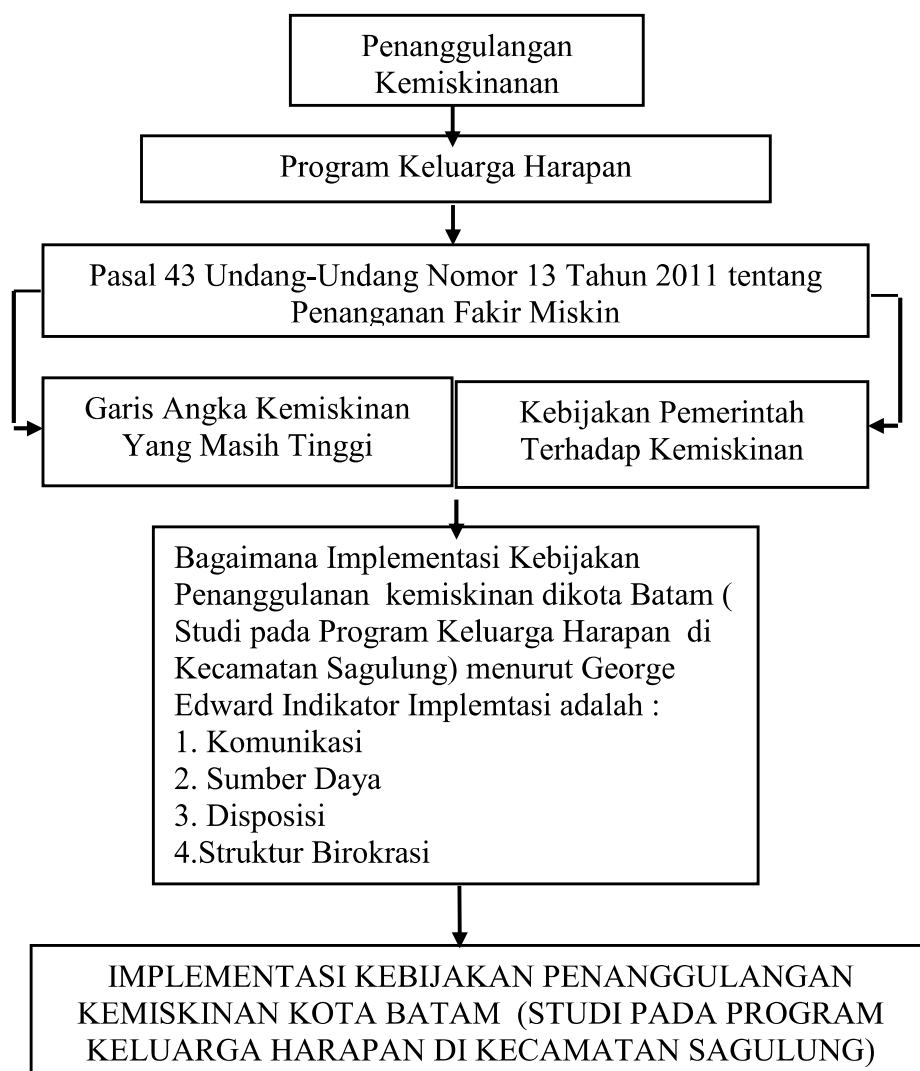
- 5) Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito,(2018) Cakti Indra Gunawan. Dengan judul penelitian implementasi pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga harapan untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di dapatkan adalah Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam PKH dapat terlaksana dengan: a).Pembenahan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. b).Berperan aktifnya para peserta program dalam mensukseskan program ini, dimana program ini dijadikan program pemberdayaan masyarakat yang baik melalui kelompok usaha bersamanya. c).Terlibatnya

para peserta program dalam sosialisasi hal – hal yang berguna dan baik kepada masyarakat sekitarnya, hal ini menjadikan para peserta PKH menjadi pendukung kegiatan – kegiatan pemerintah secara tidak sadar (Arif & Cahyo, 2018).

- 6) Antriya Eka Suwinta (2016) dengan judul penelitian implementasi program keluarga harapan (Pkh) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Dengan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan yang berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH yang menyebabkan peserta PKH tidak menyadari pentingnya mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi kehidupan sehingga tujuan PKH dalam jangka pendek belum bisa (Eka Suwinta, 2016).

2.3 Kerangka Pemikiran

Misi Program Keluarga Harapan mengupayakan perubahan perilaku dan pola pikir keluarga peserta terhadap kesehatan anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak rumah tangga sangat miskin yang pada gilirannya dapat memutus mata rantai kemiskinan.



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran peneliti